

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MEMORANDUM
NOMOR 999/DJPSDKP.5/TU.140/VII/2025

Yth. : Direktur Jenderal PSDKP
Dari : Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 15 Juli 2025

Sehubungan dengan telah selesainya penyusunan Laporan Triwulan II Tahun 2025, terlampir Kami sampaikan Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan Triwulan II Tahun 2025.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Halid K. Jusuf

Tembusan:
Sesditjen PSDKP



LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan (PSDP) dalam mencapai tujuan dan sasaran selama tiga bulan pertama di tahun 2024. Penyusunan Laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, laporan ini merupakan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Masukan, tanggapan, serta saran yang membangun bagi pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan sangat dibutuhkan untuk dijadikan perbaikan dalam pencapaian target kinerja Direktorat PSDP di masa depan.

Jakarta, 15 Juli 2025

Direktur Pengawasan

Sumber Daya Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Halid K. Jusuf

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.

Laporan Kinerja Direktorat PSDP Triwulan II tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal PSDKP atas pengelolaan kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan perikanan selama tiga bulan kedua di tahun 2025.

Tujuan pengukuran kinerja adalah menentukan tingkat kemajuan dalam meraih target kinerja sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja. Informasi indikator kinerja berisi informasi sasaran strategis, definisi, formula perhitungan/pengukuran, satuan pengukuran, jenis aspek target pada SKP, validitas, unit/pihak penanggung jawab, sumber data, status data, jenis konsolidasi data, metode cascading, klasifikasi/polarisasi dan periode pelaporan.

Selama periode triwulan II tahun 2025, Direktorat PSDP telah berhasil mencapai seluruh target yang telah ditetapkan dengan memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113,23%. Nilai tersebut diperoleh dari capaian yang hanya ditargetkan pada Triwulan II Tahun 2025, di antaranya:

Tabel. Capaian Direktorat PSDP Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Frekuensi	Target Tahunan	Target TW2	Capaian TW 2	%tase Capaian
1	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)	Triwulan	82	40	84,11	120,00
2	Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)	Triwulan	100	100	100,00	100,00
3	Indeks Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan	Semesteran	82	40	100,00	120,00
4	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Perikanan	Semesteran	62	35	80,00	120,00
5	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Semesteran	100	50	150,00	120,00
6	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat PSDP	Semesteran	81	74	84,42	114,08
7	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Lingkup Direktorat PSDP (%)	Triwulan	100	100	100,00	100,00
8	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Lingkup Direktorat PSDP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	Triwulan	95	95	95,00	100,00

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan sehingga dapat meningkatkan pencapaian kinerja pengawasan sumber daya perikanan di tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	4
2.1 RENCANA STRATEGIS	4
2.2 PERJANJIAN KERJA	10
2.3 TARGET KINERJA	11
2.4 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA	13
2.5 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 CAPAIAN KINERJA	19
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA	20
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN	31
BAB IV PENUTUP	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan dilaksanakan oleh Satker Pusat dan Satker UPT. Satker Pusat memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.

Objek pengawasan berupa pelaku usaha penangkapan ikan, pelaku usaha pengolahan hasil perikanan, pelaku usaha pembudidayaan ikan dan pelaku usaha distribusi hasil perikanan yang merupakan sebuah alat produksi pengelolaan perikanan serta aktivitasnya bersinggungan dengan ketersediaan sumber daya. Konsepsi pengawasan dan pengendalian pelaku usaha perikanan yang dibangun yaitu setiap alat produksi melakukan aktivitas usaha, maka pengawasan perikanan hadir guna memastikan aktivitas usaha tersebut sesuai ketentuan.

Peningkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan dapat dicapai melalui beberapa pendekatan, dimana salah satunya yaitu pendekatan preventif, partisipatif dan koordinatif. Rincian output koordinasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan menggambarkan sebuah upaya Satker pusat untuk melakukan pendekatan berupa koordinasi, baik internal dan eksternal dalam kerangka pengawasan perikanan. Adapun hasil akhir yang hendak dicapai berupa kepatuhan pelaku usaha perikanan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan.

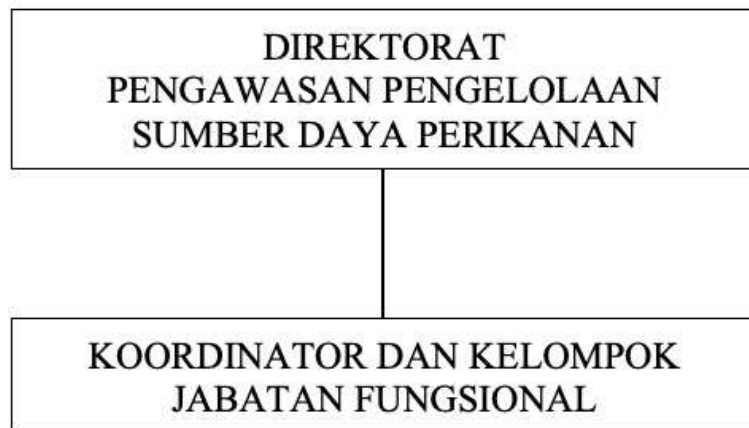
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Triwulan II Direktorat PSDP tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal PSDKP atas pengelolaankinerja dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan perikanan selama tiga bulan kedua di tahun 2025.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT PSDP

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan (PSDP) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.

Direktorat PSDP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 40 Pegawai Pusat terdiri atas 1 (satu) orang Direktur, Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Utama sebanyak 1 (satu) orang, Kepala Subdirektoral 2 (dua) orang, Subbagian 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Madya sebanyak 3 (tiga) orang, Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Muda sebanyak 9 (sembilan) orang, Pejabat Fungsional Perencana Muda sebanyak 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Perencana Pertama sebanyak 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN Mahir sebanyak 1 (satu) orang, Pejabat Pranata Komputer Pertama 1 (satu) orang, Analis Pengawasan SDKP sebanyak 14 (empat belas) orang, Analis SDM Aparatur sebanyak 1 (satu) orang, Analis Keuangan sebanyak 1 (satu) orang, Penelaah Teknis Kebijakan 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Arsiparis Terampil sebanyak 1 (satu) orang, Pengelola Keuangan sebanyak 1 (satu) orang, Pengawas Perikanan yang tersebar di 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP serta 8 (delapan) orang Pegawai Kontrak.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat PSDP

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- **Bab I Pendahuluan**, menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi Direktorat PSDP serta sistematika pelaporan.
- **Bab II Perencanaan Kinerja**, menjelaskan tentang sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kerja Direktorat PSDP, dan pengukuran capaian kinerja.
- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan tentang analisis dan evaluasi pencapaian kinerja
- **Bab IV Penutup**, menyimpulkan secara menyeluruh Laporan Kinerja Direktorat PSDP Tahun 2025 dan menguraikan rekomendasi perbaikan di masa depan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tahap awal dalam siklus penyelenggaraan SAKIP. Komponen Perencanaan kinerja yang disusun oleh Direktorat PSDP meliputi:

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Direktorat Jenderal PSDKP telah menetapkan Renstra tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran teknis secara berjenjang dari Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP sebagai salah satu unit Eselon I lingkup KKP. Renstra Ditjen. PSDKP memiliki nilai strategis karena merupakan tahapan akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2029. Penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMN 2025-2029 (Perpres 12 Tahun 2025) dengan memperhatikan arahan Presiden kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) serta mempertimbangkan arahan MKP kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen. PSDKP).

Sampai saat ini, rencana strategis Ditjen. PSDKP masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan KKP. Adapaun proses penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periode renstra 2025-2029. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan bottom up dan top down dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan top down mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan bottom up dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan

pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi Indonesia Emas 2045 “Indonesia sebagai negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan” didasari oleh landasan pemikiran bahwa visi abadi Indonesia yang tertuang didalam Pembukaan UUD 1945 yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Pada tahap pertama, periode tahun 2025 – 2029, difokuskan kepada penguatan fondasi transformasi di mana sektor kelautan dan perikanan mengusulkan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 “Terwujudnya Ekologi Perairan yang Sehat sebagai Modal Dasar Peningkatan Kontribusi Ekonomi Biru untuk Mewujudkan Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045” yang mempertegas filosofi “ekologi sebagai panglima” untuk mewujudkan laut yang sehat, laut yang kaya akan sumber daya maritimnya, dan laut sebagai sumber kesejahteraan bagi Masyarakat Indonesia. Dalam rangka mewujudkan Visi KKP 2025-2029 tersebut maka diusulkan Visi Direktorat Jenderal (Ditjen) PSDKP 2020-2024, yaitu: “Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mengawal terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029.

Visi Indonesia Emas 2045 akan dicapai melalui delapan misi yang dikelompokkan ke dalam tiga dimensi pokok yaitu: 1) Transformasi Indonesia; 2) Landasan Transformasi; dan 3) Kerangka Implementasi Transformasi. Dalam rangka memperkuat fondasi transformasi Indonesia Emas 2045, KKP mendukung pada dimensi Transformasi Indonesia (Misi Transformasi Sosial; Misi 2. Transformasi Ekonomi; Misi 3. Transformasi Tata Kelola) dan dimensi Landasan Transformasi (Misi

4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi; Misi 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi).

Visi Presiden terpilih 2025-2029 adalah Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas dengan Misi yang tertuang dalam 8 (delapan) Asta Cita di mana KKP mendukung pada:

- Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
- Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Mengacu pada tugas dan fungsi KKP dalam rangka memperkuat fondasi transformasi Indonesia Emas 2045 serta mendukung pelaksanaan Asta Cita kedua, diusulkan 5 (lima) Misi KKP 2025-2029 di mana Ditjen PSDKP mendukung:

- Misi 1 KKP “Meningkatkan kualitas ekologi perairan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan” melalui:
 - Misi 1 Ditjen PSDKP “Meningkatkan ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan”;
 - Misi 2 Ditjen PSDKP “Meningkatkan kesadaran

masyarakat kelautan dan perikanan”.

- Misi 2 KKP “Meningkatkan kontribusi Ekonomi Biru secara Inklusif terhadap Ekonomi Nasional” melalui:
 - Misi 3 Ditjen PSDKP “Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan”;
 - Misi 4 Ditjen PSDKP “Meningkatkan efek jera sektor kelautan dan perikanan”.
- Misi 5 KKP “Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi KKP” melalui:
 - Misi 5 Ditjen PSDKP “Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP”.

2. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen PSDKP tahun 2025-2029 yang mendukung Tujuan KKP tahun 2025-2029 sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel 1. Tujuan KKP dan Ditjen PSDKP Tahun 2025 – 2029

Tujuan KKP 2025-2029		Tujuan Ditjen PSDKP 2025-2029	
1	Pengelolaan ekologi perairan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif dan berkelanjutan	1	Peningkatan ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
		2	Peningkatan kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan
2	Optimalisasi potensi ekonomi biru yang belum dikelola dengan baik sebagai sumber pertumbuhan baru	3	Peningkatan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan
		4	Peningkatan efek jera sektor kelautan dan perikanan

3	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi KKP	5	Peningkatan tata kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP
---	--	---	--

Berdasarkan Tujuan KKP tahun 2025-2029 dan Tujuan Ditjen PSDKP tahun 2025-2029 tersebut maka disusun rumusan Sasaran yang dilengkapi dengan ukuran indikator kinerja melalui suatu pohon kinerja yang disusun menggunakan pendekatan kerangka logis (logical framework) dalam 5 tahap, yakni: 1) Menentukan outcome/hasil strategis yang akan dijabarkan; 2) Mengidentifikasi *Critical Success Factor* (CSF) yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja/outcome strategis; 3) Menguraikan CSF kepada kondisi-kondisi antara sampai kepada kondisi paling teknis/operasional; 4) Merumuskan Indikator Kinerja; dan 5) Menerjemahkan ke dalam perencanaan.

Outcome/hasil tingkat KKP yang menggambarkan perubahan kondisi lingkungan dan masyarakat yang diharapkan berdasarkan mandat tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan, evaluasi isu strategis, serta ekspektasi masyarakat tercermin dalam 5 (lima) Sasaran Strategis KKP tahun 2025-2029, yakni:

- SS-1 Meningkatnya perlindungan dan ketahanan lingkungan perairan yang sehat;
- SS-2 Tatakelola sektor kelautan dan perikanan yang produktif dan berkelanjutan;
- SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah Dan Daya Saing Produk KP;
- SS-4 Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan;
- SS-5 Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas;

Mengacu pada mandat tugas dan fungsi Ditjen PSDKP sesuai peraturan perundang-undangan, isu strategis dan ekspektasi stakeholder terhadap peran pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan maka Sasaran Strategis yang representatif adalah SS-2

Tatakelola sektor kelautan dan perikanan yang produktif dan berkelanjutan dengan indikator kinerja “indeks kepatuhan sektor kelautan dan perikanan” dan SS-5 Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas dengan indikator kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi KKP”.

3. Indikator Kinerja

Critical Success Factor (CSF) yang merupakan isu/permasalahan utama pada aspek pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi sebab bagi pencapaian SS-2 tata kelola sektor kelautan dan perikanan yang produktif dan berkelanjutan.

CSF SS-2 KKP tahun 2025-2029 tersebut sekaligus menjadi Sasaran Program pada Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan indikator kinerja program sebagai berikut:

1. Sasaran Program “Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan”:
 - a. Indikator Kinerja Program “Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”;
 - b. Indikator Kinerja Program “Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP”.
2. Sasaran Program “Meningkatnya kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan”:
 - a. Indikator Kinerja Program “Indeks kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan”;
 - b. Indikator Kinerja Program “Tingkat keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan”;
 - c. Indikator Kinerja Program “Tingkat keterlibatan masyarakat (Engagement Rate) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan”.
3. Sasaran Program “Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan”:
 - a. Indikator Kinerja Program “Indeks kepatuhan pelaku usaha

kelautan dan perikanan”.

4. Sasaran Program “Meningkatnya efek jera sektor kelautan dan perikanan”:

- a. Indikator Kinerja Program “Indeks efek jera sektor kelautan dan perikanan”.

Critical Success Factor (CSF) bagi pencapaian SS-5 Meningkatkan Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas adalah dengan berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP yang sekaligus menjadi Sasaran Program dengan indikator kinerja “Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP”.

2.2 PERJANJIAN KERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan iktikad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam periode waktu satu tahun, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; (3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Tahun 2025 ditetapkan 5 (lima) sasaran kegiatan dengan 15 (lima belas) Indikator Kinerja. Sebagai Sasaran Program dan Indikator kinerja yang mengalami perubahan dan penambahan pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat PSDP Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN
SK 1. Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat perikanan secara efektif	1	Tingkat Kualitas Respon/Pemahaman Audiens Peserta Sosialisasi Penyadartahuan Masyarakat Perikanan (Nilai)	80
SK 2. Terselenggaranya intelijen perikanan secara efektif	2	Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Perikanan (Nilai)	75
SK 3. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	3	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)	82
	4	Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)	100
	5	Indeks Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)	82
	6	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)	62
SK 4. Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Pengawasan sumber daya perikanan	7	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan (%)	100
SK 5. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya perikanan	8	Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat PSDP (%)	95
	9	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Direktorat PSDP (Nilai)	81
	10	Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Direktorat PSDP (Nilai)	86
	11	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat PSDP (%)	100
	12	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat PSDP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	95
	13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Direktorat PSDP (Nilai)	80
	14	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja lingkup Direktorat PSDP (Inovasi)	1
	15	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Direktorat PSDP (Nilai)	70

2.3 TARGET KINERJA

Target Kinerja adalah standar minimal pencapaian Kinerja yang ditetapkan untuk periode tertentu. Penetapan Target Kinerja merupakan

kesepakatan antara atasan dan bawahan serta mempertimbangkan usulan pengelola Kinerja Organisasi. Rincian Target kinerja Direktorat PSDP Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 3. Rincian Target Kinerja Dit. PSDP Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JENIS KONSOLIDASI DATA	TARGET 2025							
				TW1	TW2	Sd. TW2/ SM1	TW3	Sd. TW3	TW4	Sd. TW4/ SM2	TAHUN
SK 1. Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat perikanan secara efektif	1	Tingkat Kualitas Respon/Pemahaman Audiens Peserta Sosialisasi Penyadartahuan Masyarakat Perikanan (Nilai)	Posisi Akhir	0	0	0	0	0	80	80	80
SK 2. Terselenggaranya intelijen perikanan secara efektif	2	Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Perikanan (Nilai)	Posisi Akhir	0	0	0	0	0	75	75	75
SK 3. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	3	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)	Posisi Akhir	25	40	40	70	70	82	82	82
	4	Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)	Rata-rata	100	100	100	100	100	100	100	100
	5	Indeks Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)	Posisi akhir	0	40	40	0	0	82	82	82
	6	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)	Posisi Akhir	0	35	35	0	0	62	62	62
SK 4. Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Pengawasan sumber daya perikanan	7	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan (%)	Posisi akhir	0	50	50	0	0	100	100	100
SK 5. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya perikanan	8	Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat PSDP (%)	Posisi akhir	0	0	0	0	0	95	95	95
	9	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Direktorat PSDP (Nilai)	Posisi akhir	0	77	77	0	0	81	81	81
	10	Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Direktorat PSDP (Nilai)	Posisi akhir	0	0	0	0	0	86	86	86
	11	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat PSDP (%)	Rata-rata	100	100	100	100	100	100	100	100
	12	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat PSDP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	Rata-rata	95	95	95	95	95	95	95	95

	13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Direktorat PSDP (Nilai)	Posisi Akhir	0	0	0	0	0	80	80	80
	14	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja lingkup Direktorat PSDP (Inovasi)	Posisi akhir	0	0	0	0	0	1	1	1
	15	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Direktorat PSDP (Nilai)	Posisi akhir	0	0	0	0	0	70	70	70

2.4 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

Rencana aksi merupakan dokumen yang berisi rencana kegiatan untuk mencapai Target, yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu disertai dengan indikasi biaya pelaksanaan kegiatan. Rencana aksi bersifat spesifik dan berjumlah lebih dari satu. Rencana aksi kegiatan Direktorat PSDKP adalah sebagai berikut:

1. Terselenggaranya Sosialisasi Penyadartahuan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Secara Efektif

Sasaran kegiatan ini memiliki indikator kinerja Tingkat kualitas pemahaman peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat perikanan (nilai) dengan target 80%. Beberapa kegiatan pendukung pada sasaran strategis ini disajikan pada Tabel 3. berikut:

Tabel 4. Kegiatan Pendukung Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Penyadartahuan Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan

KEGIATAN PENDUKUNG (OUTPUT/KOMPONEN RKAHL)	ANGGARAN/PAGU (RP 000)	SATUAN OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN PER BULAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya Perikanan	242.000	orang	100					50			100				

1	Perencanaan kegiatan penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan	36.900														
2	Pelaksanaan kegiatan penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan	160.470														
3	Monev dan pelaporan kegiatan penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan	44.630														

2. Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Sasaran kegiatan ini memiliki beberapa indikator kinerja yaitu :

- Indeks kepatuhan pelaku usaha perikanan dengan target sebesar 82 dan indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan dengan target 100.

Kegiatan pendukung pada sasaran kegiatan ini disajikan pada Tabel

4. berikut:

Tabel 5. Kegiatan Pendukung Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan

KEGIATAN PENDUKUNG (OUTPUT/KOMPONEN RKAKL)	ANGGARAN/PAGU (RP 000)	SATUAN OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN PER BULAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	310.000	Lembaga	23			1	2	6	10	13	16	19	21	23	
1 Perencanaan/persiapan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan	62.000														

2	Pelaksanaan dan Tindak lanjut pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan	186.000														
3	Monev dan pelaporan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan	62.000														

- b. Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan dengan target 82. Kegiatan pendukung pada sasaran kegiatan ini disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 6. Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan Tahun 2025

KEGIATAN PENDUKUNG (OUTPUT/KOMPONEN RKAKL)	ANGGARAN/PAGU (RP 000)	SATUAN OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN PER BULAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha yang dipantau	1.194.840	Laporan	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Perencanaan pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan	196.732														
2 Pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan	851.748														
3 Monev Pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan	146.360														

- c. Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan dengan target 62. Kegiatan pendukung pada sasaran kegiatan ini disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan

KEGIATAN PENDUKUNG (OUTPUT/KOMPONEN RKAHL)	ANGGARAN/PAGU (RP 000)	SATUAN OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN PER BULAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha yang dipantau	400.160	Laporan	4				1			2		3			4
Tindak lanjut/pemantauan dan penilaian kepatuhan	400.160														

- d. Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan dengan target 100. Kegiatan pendukung pada sasaran kegiatan ini disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 8. Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan

KEGIATAN PENDUKUNG (OUTPUT/KOMPONEN RKAHL)	ANGGARAN/PAGU (RP 000)	SATUAN OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN PER BULAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
NSPK pengawasan pengelolaan sumber daya Perikanan	355.000	NSPK	2					1					2		
1 Perencanaan draft/rancangan NSPK	6.804														
2 Penyusunan draft/rancangan NSPK	277.052														
3 Uji Petik draft/rancangan NSPK	44.900														
4 Monitoring dan Evaluasi NSPK	26.244														

2.5 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan setiap bulan/triwulan/semester/tahun sesuai indikator kinerja. Setiap indikator kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Informasi indikator kinerja. Tujuan pengukuran kinerja adalah menentukan tingkat kemajuan dalam meraih target kinerja sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja. Informasi indikator kinerja berisi informasi sasaran strategis, definisi, formula perhitungan/pengukuran, satuan pengukuran, jenis aspek target pada SKP, validitas, unit/pihak penanggung jawab, sumber data, status data, jenis konsolidasi data, metode cascading, klasifikasi/polarisasi dan periode pelaporan. Hal ini sebagai pedoman agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam merencanakan, mengukur, mengevaluasi dan menganalisa indikator kinerja dan capaiannya.

1. Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat perikanan

Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat perikanan adalah sebuah ukuran rata-rata/mean untuk menilai tingkatan kesadaran audiens dalam memanfaatkan sumber daya perikanan dan/atau melakukan kegiatan usaha perikanan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Audiens merupakan pelaku usaha di bidang perikanan, para tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat, asosiasi di bidang perikanan serta masyarakat perikanan yang mengikuti kegiatan sosialisasi penyadartahuan masyarakat.

$$X_{\text{sadar}} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i + \dots + X_n}{n}$$

Keterangan:

- X_{sadar} : Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat perikanan
 x_i : Jumlah nilai kuesioner pemahaman masyarakat bidang pengawasan sumber daya perikanan
 n : Jumlah responden

parameter nilai:

Nilai Pemahaman Sangat Baik	:	>85
Nilai Pemahaman Baik	:	66 - 85
Nilai Pemahaman Cukup Baik	:	50 – 65
Nilai Pemahaman Kurang	:	< 50

2. Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Perikanan

Intelijen ialah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

Hasil intelijen perikanan yaitu produk pelaksanaan intelijen yang disusun oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi.

Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan adalah ukuran hasil intelijen perikanan terhadap kriteria/prosedur intelijen.

$$X_{intl} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n} \times 100$$

Keterangan:

X_{intl}	:	Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Perikanan
x_i	:	Nilai akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan
n	:	jumlah hasil intelijen perikanan

Nilai akurasi dan validitas suatu hasil intelijen perikanan mengacu pada table berikut:

No	Kegiatan	Nilai
1	Perencanaan	0.2
2	Pengumpulan data	0.5
3	Pengolahan data	0.2
4	Penyajian	0.1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Selama periode Triwulan II tahun 2025, Direktorat PSDP telah berhasil mencapai seluruh target yang telah ditetapkan dengan memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113,23%. Nilai tersebut merupakan rata-rata capaian seluruh sasaran. Adapun nilai setiap sasaran merupakan hasil perhitungan atas IKU yang menjadi parameter pencapaiannya. Rincian pencapaian setiap sasaran dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rincian Capaian Kinerja Direktorat PSDP Triwulan II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TARGET TW II	CAPAIAN TW II	%TASE CAPAIAN
SK 1. Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat perikanan secara efektif	1 Tingkat Kualitas Respon/Pemahaman Audiens Peserta Sosialisasi Penyadartahuan Masyarakat Perikanan (Nilai)	80	0	0	0
SK 2. Terselenggaranya intelijen perikanan secara efektif	2 Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Perikanan (Nilai)	75	0	0	0
SK 3. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	3 Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)	82	40	84,11	120,00
	4 Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)	100	100	100	100,00
	5 Indeks Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)	82	40	100	120,00
	6 Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)	62	35	80,00	120,00
SK 4. Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Pengawasan sumber daya perikanan	7 Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan (%)	100	50	150	120,00
SK 5. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya perikanan	8 Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat PSDP (%)	95	0	0	0
	9 Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Direktorat PSDP (Nilai)	81	75	84,42	114,08
	10 Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Direktorat PSDP (Nilai)	86	0	0	0
	11 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat PSDP (%)	100	100	100	100,00

	12	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat PSDP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	95	95	95	100,00
	13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Direktorat PSDP (Nilai)	80	0	0	0
	14	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja lingkup Direktorat PSDP (Inovasi)	1	0	0	0
	15	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Direktorat PSDP (Nilai)	70	0	0	0

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Direktorat PSDP telah melaksanakan kegiatan selama Triwulan II Tahun 2025 dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan terhadap Sasaran Strategis.

SK1 – Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat perikanan secara efektif

1. Tingkat Kualitas Respon/Pemahaman Audiens Peserta Sosialisasi Penyadartahuan Masyarakat Perikanan (Nilai)

Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat perikanan adalah sebuah ukuran rata-rata/mean untuk menilai tingkatan kesadaran audiens dalam memanfaatkan sumber daya perikanan dan/atau melakukan kegiatan usaha perikanan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan belum dilakukan dan belum dapat dihitung nilainya karena periode penghitungan pada akhir tahun.

SK2 – Terselenggaranya intelijen perikanan secara efektif

2. Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Perikanan (Nilai)

Data dan informasi intelijen perikanan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh Pengawas Perikanan atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi

Penyelesaian analisis data dan informasi intelijen perikanan yaitu data intelijen yang sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah diolah atau dianalisis yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/penindakan yang akan ditempuh. Namun, pada periode Triwulan II Tahun 2025 indikator ini belum dapat dihitung capaiannya karena periode penghitungan pada akhir tahun.

SK3 – Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan

3. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)

Indeks kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan adalah nilai kumulatif persentase kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan. Kepatuhan pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat di bidang perikanan terdiri dari: 1) pengawasan rutin terhadap proyek usaha subsektor perikanan dalam OSS, 2) pengawasan operasional kapal perikanan; 3) pengawasan importasi hasil perikanan; 4) pengawasan pemanfaat sumber daya perikanan (illegal dan tindak lanjut aduan masyarakat); dan 5) pengawasan kegiatan perikanan yang menjadi atensi pimpinan.

Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan, pada periode Triwulan II Tahun 2025 ini UPT Ditjen PSDKP telah melaporkan hasil pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan kepada Direktorat PSDP dengan batas waktu pada 2 Juli 2025, terdapat rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Pemeriksaan Direktorat PSDP Triwulan II Tahun 2025

UPT Ditjen PSDKP	Riksa UPT Ditjen PSDKP	Riksa Kapal UPT Ditjen PSDKP
Pangkalan PSDKP Batam	38	1670
Pangkalan PSDKP Benoa	12	2012
Pangkalan PSDKP Bitung	15	19934
Pangkalan PSDKP Jakarta	38	4528
Pangkalan PSDKP Lampulo	2	1034
Pangkalan PSDKP Tual	10	1178
Stasiun PSDKP Ambon	7	1536
Stasiun PSDKP Belawan	6	1087

Stasiun PSDKP Biak	5	332
Stasiun PSDKP Cilacap	11	7801
Stasiun PSDKP Kupang	9	792
Stasiun PSDKP Pontianak	13	398
Stasiun PSDKP Tahuna	3	330
Stasiun PSDKP Tarakan	4	859
Direktorat PSDP	1	-
Total	174	43.491

Berdasarkan laporan yang telah diterima tersebut, Direktorat PSDP telah menyelesaikan verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (data detail terlampir) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Pemeriksaan Direktorat PSDP Triwulan II Tahun 2025

Subsektor	Total Pemeriksaan	Kepatuhan	
		Patuh	Tidak Patuh
Pengawasan Penangkapan Ikan	11.030	10.709	321
Pengawasan Pengolahan, Distribusi, dan Pemasaran Hasil Perikanan	81	59	22
Pengawasan Pembudidayaan Ikan	65	31	34
Pengawasan Jenis Ikan yang Dilindungi	16	12	4
Total	11.192	10.811	381

Dari hasil verifikasi tersebut, jika dikonversi ke dalam rumus yang telah ditetapkan dalam manual indikator kinerja Tahun 2025, dan diperoleh rincian sebagai berikut:

$$x_{pbbr}, x_{kp}, x_{imp}, x_{pmt} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

$x_{pbbr}, x_{kp}, x_{pmt}, x_{imp}, x_{pn}$: Persentase kepatuhan pelaku usaha
 X_i : Jumlah Pelaku usaha yang dinyatakan patuh
 n : Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya

- a. Persentase Kepatuhan Proyek Usaha Perikanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Xpbbr)

Jumlah Pelaku Usaha Yang Patuh	Jumlah Pelaku Usaha yang Diriksa	% Kepatuhan
39	54	72

- b. Persentase Kepatuhan Kapal Perikanan (Xkp)

Jumlah Kapal Yang Patuh	Jumlah Kapal yang Diriksa	% Kepatuhan
10.705	11.018	97

- c. Persentase Kepatuhan Hasil Pengawasan *Destructive Fishing* (Xkp)

Jumlah Pelaku Usaha Yang Patuh	Jumlah Pelaku Usaha yang Diriksa	% Kepatuhan
2	8	25

- d. Persentase Kepatuhan Pelaku Importasi Hasil Perikanan (Ximpor)

Jumlah Pelaku Usaha Yang Patuh	Jumlah Pelaku Usaha yang Diriksa	% Kepatuhan
8	9	89

- e. Persentase Kepatuhan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Xpmt)

Jumlah Pelaku Usaha Yang Patuh	Jumlah Pelaku Usaha yang Diriksa	% Kepatuhan
22	26	85

- f. Persentase Kepatuhan Kegiatan Perikanan yang Menjadi Atensi Pimpinan (Xpn)

Jumlah Pelaku Usaha Yang Patuh	Jumlah Pelaku Usaha yang Diriksa	% Kepatuhan
35	77	45

Apabila dikonfersi ke dalam rumus capaian indikator Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Triwulan II Tahun 2025 akan didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut:

$$x_{psdp} = (x_{PBBR} * 0.4) + (x_{KP} * 0.2) + (x_{IMP} * 0.2) + (x_{PMT} * 0.1) + (x_{PN} * 0.1)$$

Keterangan:

X_{psdp}	: Indeks kepatuhan pelaku usaha perikanan
X_{pbbr}	: Persentase kepatuhan proyek usaha subsektor perikanan dalam OSS
X_{kp}	: Persentase kepatuhan kapal perikanan
X_{pmt}	: Persentase kepatuhan pelaku importasi hasil perikanan
X_{imp}	: Persentase kepatuhan pemanfaat sumber daya perikanan
X_{pn}	: Persentase kepatuhan kegiatan perikanan yang menjadi atensi pimpinan

$$X_{PSDP} = X_{PBR} * 0,4 + X_{KP} * 0,2 + X_{IMP} * 0,2 + X_{PMT} * 0,1 + X_{PN} * 0,1$$

$$X_{PSDP} = 28,89 + 24,43 + 17,78 + 8,46 + 4,55$$

$$X_{PSDP} = 84,11$$

Dengan demikian, capaian indikator kinerja sebesar 84,11 di mana telah mencapai target yang semestinya yaitu 40. Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja Triwulan I Tahun 2025 capaian pada periode ini menurun. Menurunnya kepatuhan pelaku usaha perikanan salah satunya disebabkan oleh fokus pengawasan yang lebih banyak diarahkan kepada kegiatan usaha perikanan ilegal. Hal ini berdampak pada penurunan capaian kinerja pengawasan secara kuantitatif. Namun, penurunan tersebut bukan mencerminkan kinerja yang buruk, karena strategi ini bertujuan untuk menciptakan efek jera dan meningkatkan kepatuhan secara sistemik dan menyeluruh di sektor perikanan.

4. Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)

Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan dengan capaian sebesar 100, dari target sebesar 100. Data capaian dihitung berdasarkan nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha perikanan dibagi dengan jumlah hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan. Pada periode triwulan II Tahun 2025, Pengawas Perikanan Direktorat PSDP belum melakukan pengawasan yang menjadi atensi pimpinan sehingga capaian pada periode ini sama dengan target yaitu sebesar 100.

5. Indeks Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)

Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan merupakan ukuran rata-rata terhadap kualitas pelaksanaan tahapan verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha oleh Pengawas Perikanan baik di UPT maupun di Direktorat PSDP.

Pada triwulan II tahun 2025, berdasarkan laporan dari UPT Ditjen PSDKP yang diterima, Direktorat PSDP telah menyelesaikan verifikasi terhadap seluruh hasil pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Pemeriksaan Direktorat PSDP Triwulan II Tahun 2025

Subsektor	Total Pemeriksaan	Kepatuhan	
		Patuh	Tidak Patuh
Pengawasan Penangkapan Ikan	11.026	10.707	319
Pengawasan Pengolahan, Distribusi, dan Pemasaran Hasil Perikanan	81	59	22
Pengawasan Pembudidayaan Ikan	65	31	34
Pengawasan Jenis Ikan yang Dilindungi	16	12	4
Total	11.188	10.809	379

Dari hasil verifikasi tersebut, jika dikonversi ke dalam rumus yang telah ditetapkan dalam manual indikator kinerja Tahun 2025, dan diperoleh rincian sebagai berikut:

$$X_{ver} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n}$$

- Z_{ver} : Nilai Kualitas penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan
 X_i : Nilai capaian tahapan verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan
 n : Jumlah hasil pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diverifikasi

$$X_{ver} = \frac{1.118.800}{11.188} = 100,00$$

6. Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)

Pada Triwulan II Tahun 2025 dalam menyelesaikan tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan memperoleh capaian sebesar 80. Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan adalah nilai perbandingan banyaknya rekomendasi tindak lanjut pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan yang telah diselesaikan dengan banyaknya rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan kemudian dikali dengan 100.

Berdasarkan Surat Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan Nomor: B.798/DJPSPDKP.5/PW.130/IV/2025 tanggal 29 April 2025 perihal Tindak Lanjut Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha Sektor Perikanan Periode Triwulan I Tahun 2025 terdapat 10 unit usaha yang perlu mendapatkan rekomendasi Pembinaan dan Perbaikan dari 5 UPT Ditjen PSDKP serta telah ditindaklanjuti sebanyak 8 unit usaha. Terhadap 8 unit usaha yang telah ditindaklanjuti tersebut direkomendasikan menjadi “Patuh” pada Triwulan II Tahun 2025.

Rincian hitungan untuk indikator “Indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan” Triwulan II Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

$$X_{ppkp} = (a/b) \times 100$$

- Xppkp : Persentase tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan
a : Jumlah rekomendasi tindak lanjut pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan yang diselesaikan
b : Total rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan

$$X_{ppkp} = \frac{8}{10} \times 100 = 80,00$$

Berdasarkan Surat Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan Nomor: B.1162/DJPSPDKP.5/RC.610/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025 perihal Tindak Lanjut Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha Sektor Perikanan Periode Triwulan II Tahun 2025 terdapat 47 unit usaha yang perlu mendapat rekomendasi Pembinaan dan Perbaikan dari 10 UPT Ditjen PSDKP dan perlu dilakukan

pemantauan terhadap hasil perbaikan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.

Hasil pemantauan dapat dilaporkan kepada Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan serta mengunggah hasil perbaikan melalui link <https://s.id/TLPembinaanPerbaikan2025> paling lambat pada tanggal 10 Agustus 2025.

SK4 – Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Pengawasan sumber daya perikanan

7. Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan (%)

Indikator ini merupakan perbandingan nilai tahapan penyelesaian Rancangan suatu NSPK dengan jumlah target rancangan NSPK yang diselesaikan lingkup Direktorat PSDP. Pada Triwulan II Tahun 2025, Direktorat PSDP telah menyelesaikan sebanyak 3 (Tiga) rancangan NSPK dengan rincian tahapan terdapat pada lampiran. Seluruh draf penyusunan NSPK telah disampaikan dengan mengirimkan memorandum dan melampirkan draf final kepada Sesditjen PSDKP sehingga persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan sebesar 150% dari target Triwulan II Tahun 2025 sebesar 50% dengan detail rincian perhitungan sebagai berikut:

$$X_{NSPK} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

- x_{NSPK} : Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pemantauan dan pengawasan sumber daya perikanan
- x_n : Nilai tahapan penyelesaian rancangan NSPK bidang pemantauan dan pengawasan sumber daya perikanan yang diselesaikan Direktorat PSDP
- n : jumlah target rancangan NSPK bidang pemantauan dan pengawasan SDKP lingkup Direktorat PSDP

$$X_{NSPK} = \sum_{i=1}^n \cdot \frac{3}{2} = 150$$

SK 5 – Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya perikanan

8. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat PSDP (%)

Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran digunakan untuk mengukur kinerja penyerapan anggaran lingkup Direktorat PSDP tahun 2025. Dalam rangka mencapai target realisasi anggaran, dilaksanakan aktivitas Pengendalian berupa :

- Memastikan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan sesuai dengan Kaidah;
- Memastikan Penyelesaian Kegiatan Kontraktual sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Memastikan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Akuntabel, dan
- Meminimalisir Deviasi halaman III DIPA

Pada Triwulan II tahun 2025 indikator kinerja tersebut belum dapat dihitung realisasinya karena periode penghitungan akan diakumulasikan pada akhir tahun 2025.

9. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Direktorat PSDP (Nilai)

Pencapaian sasaran ini diidentifikasi ke dalam 1 indikator kinerja yaitu indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan. Indikator Kinerja tersebut mengukur Profesionalitas ASN berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

Pada Triwulan II tahun 2025, indikator ini telah mencapai target dengan nilai sebesar 84,42 dari target sebesar 74. Nilai tersebut diperoleh dari laman ropeg.kkp.go.id.

IP ASN 2025												
Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2024												
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	76	22.83	91.32 %	29.49	73.72 %	26.51	88.37 %	5	100 %	83.83	TINGGI
2	DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA PENGAWASAN	30	23.83	95.32 %	30.77	76.92 %	25.33	84.43 %	5	100 %	84.93	TINGGI
3	DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI ARMADA	216	23.47	93.88 %	31.88	78.7 %	25.02	83.4 %	5	100 %	85.37	TINGGI
4	DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN	39	23.46	93.84 %	29.25	73.13 %	26.28	87.6 %	4.9	98 %	83.89	TINGGI
5	DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN	39	24.36	97.44 %	29.03	72.58 %	26.03	86.77 %	5	100 %	84.42	TINGGI
6	DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN	33	23.64	94.56 %	30.13	75.33 %	25.3	84.33 %	5	100 %	84.07	TINGGI

10. Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Direktorat PSDP (Nilai)

Penilaian mandiri SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.

Hasil penilaian oleh Inspektorat Mitra berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disusun itjen dengan mengacu pada lembar kerja evaluasi AKIP oleh KEMENPAN RB. Namun, pada periode ini belum dapat dinilai indikatornya karena periode penghitungan terdapat pada akhir tahun.

11. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat PSDP (%)

Persentase capaian hasil pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Direktorat PSDP Triwulan II Tahun 2025 sebesar 100%. Capaian tersebut diperoleh dari Evaluasi Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tahun 2025 dengan tujuan untuk:

1. memastikan manajemen risiko telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2024;
2. memastikan pemanfaatan manajemen risiko dalam pengendalian kebijakan dan kegiatan;
3. memastikan pemantauan terhadap aktivitas respon manajemen risiko; dan
4. memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan manajemen risiko.

12. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat PSDP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PSDP pada Triwulan II Tahun 2025 tidak terdapat temuan, realisasinya dapat disamakan dengan target yaitu sebesar 95%, sehingga persentase capaiannya sebesar 100%.

13. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Direktorat PSDP (Nilai)

Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

Nilai pengawasan kearsipan lingkup Ditjen PSDKP akan diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dengan periode tahunan.

14. Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja lingkup Direktorat PSDP (Inovasi)

Melalui Program Budaya Kerja Hasilkan Inovasi Unit Kerja (HIU), Direktorat PSDP terus berkomitmen mendorong pengembangan inovasi Pengawasan SDKP dan pengembangan kompetensi SDM yang terlibat di dalamnya, sehingga setiap unit kerja khususnya Direktorat PSDP harus menghasilkan inovasi. Inovasi sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Kriteria Inovasi yaitu memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat,

dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan. Untuk itu, indikator kinerja tersebut belum dapat dihitung jumlahnya karena periode pelaporan akan dilaksanakan pada akhir tahun.

15. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Direktorat PSDP (Nilai)

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Direktorat PSDP. Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Direktorat PSDP, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja. Untuk itu, indikator kinerja tersebut belum dapat dihitung nilainya karena periode pelaporan akan dilaksanakan pada akhir tahun.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Direktorat PSDP memiliki alokasi anggaran awal TA 2025 sebesar Rp7.165.926.000 (Tujuh milyar Seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah). Setelah mengalami Automatic Adjustment (AA) dan efisiensi anggaran sesuai Inpres 01/2025 sehingga total anggaran Direktorat PSDP menjadi Rp1.350.646.000 (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah). Realisasi anggaran Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp770.244.648 (Tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) atau 57,03% dari pagu anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2025 Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Direktorat PSDP pada periode triwulan bersangkutan, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun kesimpulan dan saran kegiatan penyusunan laporan kinerja triwulan II tahun 2025 adalah:

1.1. Kesimpulan

- a. Periode Triwulan II Tahun 2025 Direktorat PSDP telah berhasil mencapai seluruh target yang telah ditetapkan dengan memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113,23%.
- b. Pada Triwulan II Tahun 2025, dari 11.188 unit usaha perikanan yang telah dilakukan pemeriksaan, sebesar 10.809 unit usaha perikanan dinyatakan patuh. Sehingga diperoleh indeks kepatuhan sebesar 84,11 di mana telah mencapai target yang semestinya yaitu 40.

1.2. Saran

- a. Untuk meningkatkan dan mengontrol Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebaiknya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- b. Perlu dipertahankan agar seluruh target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- c. Berkoordinasi dan memantau secara berkala terkait proses penjadwalan pengawasan usaha perikanan yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan UPT Ditjen PSDKP.